

RENCANA KERJA 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB.KUTAI KARTANEGARA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen **Rancangan Awal Rencana** Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ranwal PD). Dokumen tersebut merupakan dokumen rancangan awal perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan, yaitu pemungutan PAD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah untuk mendukung capaian visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026. Rencana dan strategi untuk mendukung capaian visi dan misi kepala daerah tersebut disusun dalam dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai target kinerja utama kepala daerah, serta untuk menangani isu strategis pelayanan Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rancangan Rancana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2024 disusun untuk menjabarkan prioritas dan target kinerja serta menjadi pedoman pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun **2024**, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2209 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai panduan arah kebijakan pembangunan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
2. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
3. Memastikan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsistensi program dan kegiatan sampai dengan dokumen penyusunan dokumen anggaran;
4. Memastikan konsistensi arah kebijakan perangkat daerah dengan rumusan pelaksanaannya melalui program/kegiatan;
5. Mendukung prioritas Bupati Kutai Kartanegara pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.

Tahun 2025 merupakan perencanaan tahun ke-**lima** Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dimana proses penyusunan Renstra 2021 - 2026 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, sehingga penetapan target kinerjanya berpedoman pada RPJMN 2024 – 2024, RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025, RPJMD Teknokratik 2021 dan Rancangan Awal RKPD 2024. Dokumen tersebut yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Untuk dapat menetapkan target kinerja indikator program, kegiatan dan pagu indikatif Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, maka dilakukan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dengan menilai capaian realisasi indikator program dan kegiatan, serta memperkirakan capaian realisasi kinerja indikator program dan kegiatan tahun 2024. Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Secara umum rata-rata capaian fisik realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 mencapai 95% dengan predikat kinerja sangat tinggi dan realisasi keuangan sebesar Rp.58.656.497.368,- atau 92,53% dari Pagu Bapenda sebesar Rp.63.389.143.244,-

Dengan rincian capaian kinerja masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator Nilai Sakip Perangkat Daerah telah memenuhi target kinerja dengan capaian realisasi kinerjanya sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.50.324.659.925,- atau 92,3% dari pagu sebesar

Rp.54,528.143.244,- Tercapainya target kinerja program disebabkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan output yang ditargetkan dapat tercapai semua.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat telah memenuhi target dengan capaian target untuk 2023.... dari target 95,78% serta realisasi keuangan sebesar 94,4% atau Rp.670.861.651,- dari pagu sebesar Rp.711.000.000,-

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah tidak memenuhi target kinerja dengan rata-rata capaian realisasi kinerjanya sebesar dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.620.846.251,- atau 93,5% dari pagu Rp.8.150.000.000,- Tercapainya target kinerja program Program Pengelolaan Pendapatan Daerah disebabkan output yang ditargetkan dapat tercapai semua.

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Review hasil pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daeah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023, dan pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 terlampir dalam format tabel berikut (Tabel T-C.29)

Tabel T-C.29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024(TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2024)	
					TARGET RENJA-PD TAHUN (2024)	REALISASI RENJA-PD TAHUN (2024)	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Persen	0	100	200 Persen	2,00
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah	9 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	0 Persen	0	8	16 Persen	1,78
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0	6	4 Dokumen	2,00

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1	1 Dokumen	2,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1	1 Dokumen	2,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Persen	100	100	200 Persen	2,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	283 Orang	14 Bulan	283 Orang	28 3 Orang	2	280	577 Orang	2,04
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2	2	2 Dokumen	5,00

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1	12	36 Laporan	3,00
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Persen	0 Persen			100 Persen	1,00
			Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1	4	12 Laporan	3,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Kinerja ASN	80 Persen	80 Persen	80 Persen	0 Persen	0	80	240 Persen	3,00
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	1	11	33 Dokumen	0,14
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	1	30	90 Orang	3,00

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen	80 Persen	80 Persen	0 Persen	0	80	240 Persen	3,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	30 Paket	1 Paket	1	30	90 Paket	3,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.054 Paket	4.054 Paket	4.000 Paket	1 Paket	1	4.000	12.054 Paket	2,97
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	40 Paket	1 Paket	1	40	120 Paket	3,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000 Laporan	1.000 Laporan	1.000 Laporan	1 Laporan	1	1.000	3.000 Laporan	3,00
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	1.000 Laporan	1 Dokumen	1	1.000	3.000 Dokumen	3,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	100 Persen	1 persen	0	100	300 persen	3,00
			Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 unit	30 unit	20 unit	1 unit	0	20	70 unit	4,67

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	1 unit	1	1	3 unit	3,00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	80 Persen	80 Persen	80 Persen	0 Persen	0		160 Persen	2,00
			Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	1 Laporan	1	25	75 Laporan	3,00
			Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1	12	36 Laporan	3,00
			Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0	4	10 Laporan	5,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58 Laporan	58 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0	12	82 Laporan	1,41
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 Bulan	12	12	12 Bulan	3,00

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	1	6	18 unit	3,00
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	1	50	150 unit	3,00
			Pemeliharaan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	100 unit	50 unit	50 unit	1	50	200 unit	2,00
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	1	5	15 unit	3,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	29 persen	27.65 persen	50 persen	0 persen	0	50	50 persen	1,70
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah WP yang Laporan	52.812 WP	60.451 WP	68.750 WP	0 WP	0	68.750	197.951 WP	3,75
				Jumlah WP	180.000 WP	199.697 WP	137.500 WP	0 WP	0	137.500	474.697 WP	2,64
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0	2	5 Dokumen	5,00

			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0	3	7 Dokumen	7,00
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	0	5	13 Laporan	4,33
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3.746 Laporan	3.746 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0	2	3.750 Laporan	1,00
			Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	180.000 Laporan	180.000 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0	3	180.006 Laporan	1,00
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	160.000 Objek Pajak	160.000 Objek Pajak	160.000 Objek Pajak	0 Objek Pajak	0	160.000	480.000 Objek Pajak	3,00
			Penetapan Wajib pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	11.000 Dokumen	11.000 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0	2	11.004 Dokumen	1,00
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.491 Layanan	7.491 Layanan	7.491 Layanan	0 Layanan	0	7.491	22.473 Layanan	3,00

			Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	180.000 Dokumen	180.000 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0	2	180.004 Dokumen	1,00
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0	2	1.004 Dokumen	1,00
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80 Dokumen	80 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0	2	84 Kasus	1,05
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100 Dokumen	100 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0	3	106 Wajib pajak	1,06
			Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 Laporan	100 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0	2	104 Laporan	1,04
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana Pengelolaan pajak	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0	1	3 Unit	3,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan penetapan dana bagi hasil pusat	95 Persen	96 Persen	95 Persen	0 Persen	0	95.48	96 Persen	1,00
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perhitungan penerimaan DBH Pusat	1.847 Triliun Rupiah	2.272 Triliun Rupiah	2.112 Triliun Rupiah	0 Triliun Rupiah	0	2.112	6.496 Triliun Rupiah	3,52
				Realisasi penerimaan DBH Pusat	1.937 Triliun Rupiah	2.372 Triliun Rupiah	2.212 Triliun Rupiah	0 Triliun Rupiah	0	2.212	6.796 Triliun Rupiah	3,51

			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Ketepatan Perhitungan Dana Bagi Hasil	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	0 Laporan	0	1	3 Laporan	3,00
--	--	--	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	-----------	------

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah perlu didukung oleh pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dalam pengelolaannya dan merupakan kemampuan keuangan daerah sendiri dimana setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pendapatan Asli Daerah merupakan alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya untuk keperluan rutin.

Untuk itu Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus melakukan upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Dan dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta sub kegiatan selama tahun 2024.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan rasio pendapatan pada tahun yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Target dan Realisasi capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator Pertumbuhan Pajak Daerah sesuai dengan Target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2025 sesuai dengan Tabel terlampir (Tabel T-C.30)

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA-PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan Pajak Daerah			7,52%	8,43%	9,66%	11,33%	7,52%	24,13%	24,13%	24,13%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah menemukan kendala dan hambatan-hambatan untuk melaksanakan program dan kegiatannya. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. Banyaknya potensi pajak daerah yang belum tergali
- b. Kurangnya koordinasi Pemungutan Pajak
- c. Kondisi Geografis yang luas
- d. Hilangnya potensi Pajak Daerah
- e. Kunjungan wisata ke Kutai Kartanegara tinggi tetapi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Review terhadap **rancangan awal** Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dapat diuraikan pada tabel terlampir (tabel T-C.31)

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP **RANCANGAN AWAL** RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPENDA	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	44.472.297.941	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	53.396.069.678	
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah	100 Persen	500.000.000	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	500.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000	Pergeseran pagu sub.keg Koordinasi Penyusunan RKAP dan Sub.Keg.Koordinasi Penyusunan DPPA untuk efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BAPENDA	-	-	0	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	BAPENDA	-	-	0	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	BAPENDA	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	50.000.000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	-	-	0	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	BAPENDA	-	-	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	2 Dokumen	150.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabe	5 Laporan	31.350.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabe	5 Laporan	37.438.771.737	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang	31.340.331.853		BAPENDA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 orang	37.118.771.737	Pagu sesuai catatan dari tim Anggaran BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	25.000.000	Pergeseran pagu dari sub.keg.Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	270.000.000	Penambahan pagu disesuaikan dengan kebutuhan pagu yang selalu kurang di akhir tahun
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BAPENDA	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	40.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BAPENDA	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	25.000.000	Pagu dana digeser ke sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	4 Laporan	200.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	4 Laporan	115.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	

	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	100.000.000,00	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	400.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	400.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPENDA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	100.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPENDA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	150.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	BAPENDA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	BAPENDA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	250.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BAPENDA	Persentase Administrasi umum Perangkat	80 Persen	2.700.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BAPEND A	Persentase Administrasi umum Perangkat	80 Persen	1.900.000.000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	BAPENDA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	300.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	BAPENDA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	300.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	BAPENDA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.054 Paket	300.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	BAPENDA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.054 Paket	300.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BAPENDA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BAPENDA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket	200.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000 Paket	1.800.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000 Paket	1.000.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000 Dokumen	100.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BAPEND A	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	80 Persen	4.300.086.797	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BAPENDA	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	80 Persen	5.800.086.797	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	1.000.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	2.500.000.000	
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	3.300.086.797	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.300.086.797	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.172.211.144	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.372.211.144	
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	10.000.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	0	
	Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000.000	Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.500.000.000	
	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	100.000.000	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	100.000.000	Penambahan volume target,ada tiga gedung UPT yang di sewa

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58 Laporan	1.772.211.144	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58 Laporan	1.772.211.144	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80 Persen	1.850.000.000,	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80 Persen	3.450.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BAPENDA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	650.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BAPENDA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	650.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	BAPENDA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	500.000.000	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	BAPENDA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	500.000.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan yang dipelihara/ direhabilitasi	5 Unit	700.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	9 Unit	2.300.000.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	50 Persen	5.150.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	50 Persen	7.900.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah WP yang Laport	68.750 WP	5.150.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah WP yang Laport	68.750 WP	7.900.000.000	
			Jumlah WP	137.500 WP				Jumlah WP	137.500 WP		
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	200.000.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	500.000.000	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	BAPENDA	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	250.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	BAPENDA	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	250.000.000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	675.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	750.000.000	

	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3.746 Laporan	500.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3.746 Laporan	1.650.000.000	
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	180.000 Laporan	400.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	180.000 Laporan	400.000.000	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	160.000 Objek pajak	500.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	160.000 Objek Pajak	500.000.000	
	Penetapan Wajib pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	11.000 Dokumen	250.000.000	Penetapan Wajib pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	11.000 Dokumen	500.000.000	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	BAPENDA	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.491 Layanan	200.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	BAPENDA	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.491 Layanan	200.000.000	

	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	180.000 Dokumen	250.000.000	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	180.000 Dokumen	500.000.000	
	Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.000 Dokumen	500.000.000	Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.000 Dokumen	600.000.000	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80 Dokumen	350.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80 Dokumen	500.000.000	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100 Dokumen	200.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100 Dokumen	400.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 Laporan	150.000.000	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 Laporan	300.000.000	

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah unit sarana dan prasarana pengelolaan pajak	1 Unit	450.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah unit sarana dan prasarana Pengelolaan pajak	1 Unit	450.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat		600.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat		650.000.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Perhitungan Penerimaan DBH Pusat			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Perhitungan Penerimaan DBH Pusat		611.000.000	
			Realisasi Penerimaan DBH Pusat					Realisasi Penerimaan DBH Pusat			
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BAPENDA	Ketepatan Perhitungan Dana bagi hasil	95,78 Persen	611.000.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BAPENDA	Ketepatan Perhitungan Dana Bagi Hasil	95,78 Persen	611.000.000	
	Jumlah				50.222.297.941					61.946.069.678	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan dan sub.kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah merupakan hasil rumusan perencanaan melalui Musrenbang tingkat kabupaten.

Dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD tingkat kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kartanegara tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari provinsi, LSM, Asosiasi maupun Perguruan tinggi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adapun arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional adalah:

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pertumbuhan, berpihak pada pekerjaan, berpihak pada kaum miskin, dan berpihak pada lingkungan;
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam;
3. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri di luar Pulau Jawa;
4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;
5. Pengembangan sektor perikanan dan infrastruktur pedesaan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7. Penguatan ketahanan pangan dan energi;
8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.

Arah kebijakan nasional harus memenuhi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu:

1. Layak secara ekonomi, dengan ciri:
 - a. Program-program strategis yang dikembangkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Mempunyai nilai tambah yang tinggi;
 - c. Program harus berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan wilayah;
 - d. Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
 - e. Melanjutkan program-program strategis yang belum tercapai;
 - f. Berdampak luas terhadap investasi nasional.
2. Diterima secara sosial, dengan ciri:
 - a. Tidak menimbulkan masalah baru;
 - b. Membuka/menyerap lapangan kerja;
 - c. Mengurangi kemiskinan;
 - d. Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah;
 - e. Memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat;
 - f. Mendorong keharmonisan masyarakat;
 - g. Mendorong tingkat partisipasi masyarakat.

3. Berkelanjutan secara ekonomi, dengan ciri:
 - a. Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yang ditoleransi;
 - b. Memperbaiki kualitas lingkungan;
 - c. Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang

Dalam penerapan sistem penganggaran terpadu, telah dilakukan penyatuan dokumen perencanaan belanja negara sehingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, duplikasi pendanaan untuk satu kegiatan yang sama dapat dihindari.

Pemanfaatan sistem penganggaran berbasis kinerja, bertujuan agar setiap biaya yang dialokasikan dalam suatu kegiatan dapat dikaitkan dengan output dan outcome yang dihasilkan, sehingga terjadi perpaduan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan. Permasalahan yang timbul dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki.

Selanjutnya, tantangan dalam implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah, diantaranya adalah sulitnya menentukan pengeluaran (belanja negara) dalam perspektif jangka menengah, dengan mempertimbangkan resiko dan implikasi biaya yang berpotensi terjadi pada tahun tahun berikutnya.

Bahwa dokumen Rancangan RKPD mengacu pada Rancangan RPJMD tahun 2021-2026, dimana dokumen tersebut memuat visi dan misi Pemerintah kabupaten yang wajib dipedomi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

Ada pun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kemandirian fiskal Daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah
2. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
3. Optimalnya penerimaan Dana Bagi Hasil

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan kegiatan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgencitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program. Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis guna menyesuaikan dengan kondisi kontemporer di daerah, terutama terkait dengan daya dukung pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicantumkan dalam rencana strategis. Sesuai dengan visi BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang dalam **draf Renstra** BAPENDA adalah :“ **Menuju Kemandirian Fiskal Daerah melalui Data Tarik Investasi** ”

Estimasi kebutuhan dana/anggaran dimanfaatkan untuk melaksanakan 3 (Tiga) program yang dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) kegiatan dan 48 sub kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selalu berada dalam koridor untuk mewujudkan tujuan dan arah kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai dengan visi BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang, maka program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 sesuai tabel terlampir (Tabel T-C.33)

Tabel (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025 DAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA	100%	53.396.069.678			100%	53.396.069.678
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah	BAPENDA	9 Dokumen	900.000.000			9 Dokumen	900.000.000
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	50.000.000			1 Dokumen	50.000.000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 data	50.000.000			1 data	50.000.000
	Pelaksanaan Forum Peramgkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah		1 Berita Acara	50.000.000			1 Berita Acara	50.000.000

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	6 Dokumen	450.000.000	APBD		6 Dokumen	450.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		2 Dokumen	150.000.000			2 Dokumen	150.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	BAPENDA	5 laporan	37.438.771.737	APBD		5 laporan	34.663.842.138
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	238 Orang	37.118.771.737	APBD		330 Orang	34.373.842.138
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPENDA	2 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	40.000.000

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BAPENDA	1 Laporan	270.000.000	APBD		15 Orang	250.000.000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BAPENDA	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	25.000.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	BAPENDA	4 Laporan	115.000.000	APBD		Laporan	200.000.000
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	25.000.000			1 Dokumen	50.000.000
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	50.000.000			1 Laporan	50.000.000
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	30.000.000			1 Laporan	50.000.000
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	10.000.000			1 Dokumen	50.000.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Dokumen	10.000.000			1 Dokumen	10.000.000

			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Dokumen	10.000.000			1 Dokumen	10.000.000
			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		11 Dokumen	400.000.000,00				350.000.000,00
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPENDA	11 Dokumen	150.000.000	APBD		11 Dokumen	100.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPENDA	30 Orang	250.000.000	APBD		30 Orang	250.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat	BAPENDA	80 Persen	3.300.000.000	APBD		80 Persen	2.800.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	30 Paket	300.000.000	APBD		30 Paket	300.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BAPENDA	4.054 Paket	300.000.000	APBD		4.054 Paket	300.000.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BAPENDA	45 Paket	200.000.000	APBD		45 Paket	200.000.000

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	1.000 Paket	1.000.000.000	APBD		1.000 Paket	1.000.000.000
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPENDA	1.000 Dokumen	100.000.000	APBD		1000 Dokumen	100.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	BAPENDA	80 Persen	5.800.086.797	APBD		80 Persen	4.300.086.797
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	BAPENDA	1 Unit	2.500.000.000	APBD		1 Unit	1.000.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	3.300.086.797			1 Unit	3.300.086.797
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	BAPENDA	12 Bulan	3.372.211.144	APBD		12 Bulan	3.372.211.144
			Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPENDA	12 Laporan	1.500.000.000	APBD		12 Laporan	1.000.000.000

			Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	3 Laporan	100.000.000	APBD		2 Laporan	100.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPENDA	58 Laporan	1.772.211.144	APBD		58 Laporan	1.772.211.144
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	BAPENDA	80 Persen	3.450.000.000	APBD		80 Persen	3.650.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPENDA	26 Unit	650.000.000	APBD		26 Unit	650.000.000
			Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPENDA	100 Unit	500.000.000	APBD		100 Unit	500.000.000
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	BAPENDA	5 unit	2.300.000.000	APBD		5 unit	2.500.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	70 Persen	7.900.000.000,00	APBD		70 Persen	4.875.000.000,00
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Validitas data WP dan Penerimaan Pajak Daerah	BAPENDA	80 Persen	7.900.000.000,00	APBD		80 Persen	4.875.000.000,00

			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	1 Dokumen	500.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Dokumen	250.000.000
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	3 Laporan	750.000.000	APBD		3 Laporan	675.000.000
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	3.746 Laporan	1.650.000.000	APBD		3.746 Laporan	500.000.000
			Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	180.000 Laporan	500.000.000	APBD		180.000 Laporan	400.000.000
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BAPENDA	160.000 Objek pajak	700.000.000	APBD		160.000 Objek pajak	500.000.000

			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA	11.000 Dokumen	500.000.000	APBD		11.000 Dokumen	250.000.000
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA	7.491 Layanan	200.000.000	APBD		7.491 Layanan	200.000.000
			Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BAPENDA	180.000 Dokumen	500.000.000	APBD		180.000 Dokumen	250.000.000
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	1.000 Dokumen	600.000.000	APBD		1.000 Dokumen	500.000.000
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	80 Dokumen	500.000.000	APBD		80 Dokumen	350.000.000
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	100 Dokumen	400.000.000	APBD		100 Dokumen	200.000.000
			Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	100 Laporan	300.000.000	APBD		100 Laporan	150.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak	BAPENDA	1 Unit	450.000.000	APBD		1 Unit	450.000.000

		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			80 Persen	650.000.000			80 Persen	611.000.000
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perhitungan Penerimaan DBH Pusat	BAPENDA			APBD			
			Realisasi Penerimaan DBH Pusat							
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Ketepatan Perhitungan Dana bagi hasil	BAPENDA	95,78%	650.000.000	APBD		95,78%	611.000.000
		Jumlah				61.946.069.678,-				54.522.140.079,-

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Dokumen Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pejabat eselon dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Kerja yang disusun ini masih jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

BAB V PENUTUP

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Dokumen Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Rancangan Awal Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pejabat eselon dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rancangan Renja yang disusun ini masih jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga Dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Tenggarong, 5 Agustus 2024

